

KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA MAKASSAR

¹M Jufri Aburaera, ²Hasran & ³Bachtiar

¹Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Pejuang. R.I

Email: m.jufri.aburaera@gmail.com

²Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Pejuang. R.I

Email: doktorhasran@gmail.com

³Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Pejuang. R.I

Email: bachtiar@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah, untuk memperoleh gambaran tentang kinerja BAPPEDA Kota Makassar dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambar tentang kinerja BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA Kota Makassar dalam menyusun perencanaan pembangunan pada dasarnya aparat BAPPEDA dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada dokumen perencanaan. Penilaian aparat BAPPEDA terhadap kinerjanya sangat bersifat subjektif. Walaupun demikian ternyata ada responden yang menilai kinerja aparat BAPPEDA kurang baik. Namun dapat disimpulkan bahwasanya aparat BAPPEDA telah mampu melaksanakan tugasnya dalam mempertimbangkan segala kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAPPEDA senantiasa melakukan koordinasi serta memberitahukan kepada seluruh stakeholders yang ada tentang hasil perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai bahan acuan kepada masyarakat maupun DPRD Kota Makassar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Kata kunci: Inovasi; Governance; Pelayanan

PENDAHULUAN

Kota Makassar yang sebagai suatu wilayah merupakan manifestasi dari pemerintah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tak terlepas dari kesuksesan pembangunan daerah. Hal ini termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 150, dikatakan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, maka pembangunan di segala bidang yang tengah dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat pada dasarnya sebagian besar dilaksanakan di daerah. Memperhatikan Pola Umum Pembangunan Nasional, pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan, dan dituntut pembangunan yang bersifat multidimensional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan di daerah, menghadapi banyak masalah yang cukup kompleks. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang

cukup baik dalam pembangunan untuk mencapai keberhasilan tujuan pembangunan nasional secara optimal sesuai dengan yang telah dicita-itakan.

Bertolak pada asumsi tersebut, maka tiada lain alternatif dalam upaya pencapaian sasaran bagi penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, kecuali berdasarkan faktor kondisi dan situasi dengan memperhatikan hasil riset atau hasil studi kelayakan untuk memperoleh data yang akurat guna menyusun rencana dan pengambilan keputusan, yang mana merupakan proses yang cukup strategis nilainya.

Penyelenggaraan pembangunan daerah yang senantiasa didasarkan pada konsep perencanaan sebagai pola dasar pelaksanaan rencana-rencana yang telah disusun dalam rangkaian pembangunan sangatlah mendasar sifatnya, yang mana akan menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya membutuhkan pertimbangan berbagai macam aspek diantaranya yaitu perkiraan akan kemampuan akan sumber daya manusianya, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat kondisional. Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan diharapkan tumbuh perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*Bottom Up dan Top Down Planning*).

KAJIAN TEORI

Konsep Kinerja

Para ahli mendefinisikan istilah kinerja berbeda-beda sesuai dengan cara pandang dan latar belakang keilmuannya Menurut Yeremias T Keban (J. P. Sianipar, 1994:1) mengartikan kinerja sebagai “tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*, atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian organisasi”. Kemudian lebih lanjut menurut Moelyono (1997:187) mengatakan bahwa “*Kinerja adalah sebagai sesuatu yang diapai atau prestasi yang dapat diperlihatkan*”. Lebih lanjut pengertian kinerja menurut Cascio (Achmad Rucky, 2001:13) berpendapat bahwa “*kinerja adalah sebuah gambaran/deskripsi sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan pekerjaan dari seseorang atau satu kelompok*”. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel (Achmad Rucky, 2001:15) mengenai pengertian kinerja bahwa “*performane is defined as the record of outcomes produced on anspecifed job function or actifity during a sprcified time period*” yang artinya adalah Prestasi kerja merupakan catatan-catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan/kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu”.

Selanjutnya defenisi kinerja menurut Miftha Thoha (1985:45) “*suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut standar yang telah ditentukan*”. Kinerja atau prestasi kerja menurut Agus Dharma (1991:1) “*adalah sesuatu yang dikerjakan atau jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang*”. Menurut Gordon B. Davis (Widyahartono, 1992:346). “*Kinerja adalah penampakan kemajuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang tercermin dari hasil pekerjaan*”.

Oleh karena itu, seseorang dapat menghasilkan sesuatu pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka disitulah kinerja dapat diketahui. Selanjutnya pengertian kinerja menurut Musanef (1993:98) bahwa prestasi kerja atau kinerja adalah kemampuan seseorang dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih baik/yang lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. Esensi pengukuran penilaian kinerja organisasi publik dikemukakan oleh Henry Simamora (1996:330) dengan menegaskan tujuan pokok sistem penilaian kerja yaitu menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi, semakin akurat dan valid informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja semakin besar nilai terhadap organisasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Defenisi perencanaan di kalangan para ahli umumnya memiliki perbedaan tergantung dari sudut mana perencanaan itu disorot. Dibawah ini dikemukakan defenisi tentang perencanaan berdasarkan pendapat masing-masing pakar. Pengertian perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Sebagaimana yang diketahui perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap sudut tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara konvergensi, sehingga akan terbentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Sofyan Syafri perencanaan adalah fungsi menetapkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencvapai tujaun yang telah ditetapkan. Wedgewood-Oppenheim sebagaimana dikutip oleh Lawton dan Rose (1995) dalam bukunya yang berjudul *Organization and Manajement In The Public Sector*, menyatakan bahwa *planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence and asumptions are translated by a process af logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims*. Artinya bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti factual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argument logis kedalam peneraoan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Seperti Gerge R. Terry yang dikutip oleh Drs Moekkizat dalam bukunya yang berjudul *Fungsi-fungsi Manajemen* bahwa perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hasil membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegitan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sering ditemukan adanya pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Ginandjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Indikator-Indikator Kinerja BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kualitas Produk Perencanaan

Konsep tentang kualitas telah menjadi pokok bahasan yang cukup tajam akhir-akhir ini. Hal ini paling tidak di pengaruhi oleh tuntutan perkembangan zaman dalam memasuki pasar bebas yang telah menjadikan kualitas sebagai tema sentral dalam hubungan dengan pelayanan barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengadakan peningkatan kualitas produk yang dapat memenuhi standarisasi produk yang layak. Demikian perencanaan pembangunan telah diarahkan pada peningkatan kualitas rencana yang dapat memuaskan masyarakat. Menurut Trigono kualitas adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas hasil kerja kualitas cara kerja. Kerkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal, dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan persyaratan pelanggan/masyarakat.

Dari pengerian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat memuaskan pihak-pihak yang menerima produk tersebut. Kualitas produk perencanaan dalam penelitian ini, dilihat dari pelayanan penguangan usul rencana dalam anggaran daerah berdasarkan standar yang ditetapkan berdasarkan ketetapan berdasarkan kesepakatan bersama, dan digunakan untuk mengetahui kewajaran dan kemanfaatannya bagi pelaku, masyarakat dan Negara di masa yang akan datang.

2. Produktifitas

Defenisi produktifitas menurut Malayu Hasibuan bahwa produktifitas kerja adalah perbandingan antara output dan input, dimana outputnya harus mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaannya lebih baik. Sedangkan menurut Liang Gie bahwa produktifitas merupakan perbandingan antara hasil kerja berupa barang atau jasa dengan sumber-sumber bahan/tenaga yang dipakai dalam proses produksi itu kata produktif pada umumnya diartikan sebagai kemampuan pada seorang atau alat untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja yang lebih banyak dari pada ukuran biasa yang telah umum, misalnya pengarang yang produktif.

Aparat maupun organisasi yang produktif adalah aparat atau organisasi yang mampu menggabungkan pemanfaatan semaksimal mungkin dari waktu, dana dan perlengkapan serta keterampilan yang diperoleh sehingga diperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari usaha yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan, mampu menyatukan orientasi, daya guna, hasil guna, keekonomikan dan kehematan sedemikian rupa. Organisasi diharapkan produktif dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi untuk dipergunakan oleh pengguna produk tersebut.

3. Responsif

Responsif berasal dari kata response atau jawaban yang berarti reaksi penerima berita atas berita yang diterimanya, suatu komunikasi dapat mengakibatkan reaksi yang berbeda-beda, ialah

positif, artinya sambutan baik atas berita itu dan negatif, artinya sambutan jelek. Defenisi tersebut apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat disimpulkan aparat harus tanggap terhadap perubahan yang terjadi, saran yang disampaikan oleh berbagai kelompok, tuntutan yang diajukan bahkan kritik membangun yang disarankan harus dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pembangunan daerah. Tidak tanggap dapat berakibat tidak tertampungnya kebutuhan dan keinginan di daerah yang sama artinya kehilangan kesempatan untuk memperoleh masukan penting

4. Akuntabilitas

Sebelum membahas akuntabilitas lebih lanjut, berikut dikemukakan pengertiannya. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu usaha media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dilaksanakannya akuntabilitas oleh instansi pemerintah menjadikannya beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan telah memenuhi unsur beriku: a) Menentukan tujuan yang tepat; b) Mengembangkan satndar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan tersebut diatas; c) Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar; d) Pengembangan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien. Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu tertentu.

Proses akuntabilitas berkaitan dengan apakah terdapat prosedural-prosedural yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas tertentu dan dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian disampaikan pada publik, sehingga semua pihak yang berkepentingan mengetahuinya. Jadi, partisipasi semua pihak sangat mendukung lancarnya proses akuntabilitas ini.

5. Motivasi Kerja

Dalam Ensiklopedi Administrasi, dikemukakan bahwa motivasi adalah dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota dalm menanggapi sesuatu peristiwa dalam masyarakat. Motivasi ini dapat berupa motivasi pribadi dadn adpt pula motivasi kelompok. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi orang, khususnya tiap pegawai BAPPEDA dalam penelitian ini adalah berbeda karena adanya perbedaan kepentingan, baik itu dalam bentuk keinginan merasakan kepuasan dalam pekerjaanya, kaebutuhan akan imbalan, dan kegaurahan untuk berprestasi tinggi.

Lebih lanjut Ibnu Syamsi dalam bukunya *Pokok-pokok Oraginisasi dan Manajemen* mengemukakan bahwa orang bekerja itu empeunyai beberapa motivasi yaitu :

- a. Kepastian: masa depan yang pasti melalui kelangsungan kerja;

- b. Kesempatan: misalnya kesempatan untuk naik pangkatnya atau di promosikan;
- c. Peran serta: bawahan berperan serta dalam rangka pembuatan keputusan, melalui sasaran-sasaran atau kasukan-masukannya;
- d. Pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi kerjanya;
- e. Ekonomi: berupa upah atau gaji yang layak untuk hidup sekeluarga;
- f. Pencapaian: yakni merasa berhasil dalam pekerjaan;
- g. komunikasi: alangkah senangnya apabila karyawan itu mengetahui apa saja yang terjadi dalam instansi;
- h. Kekuasaan yakni memiliki kewibawaan, dan dapat mempengaruhi orang lain;
- i. Keterpaduan: yakni merasa dirinya merupakan bagian dari organisasi secara keseluruhan;
- j. Kebebasan: kebebasan pribadi dan kebebasan berpendapat.

Untuk itu perlu di ciptakan motivasi yang seayrah untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka kelangsungan usaha dan mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga apa yang menjadi kehendak dan cita-cita aparat BAPPEDA dan dapat diwujudkan. Jika seseorang atau sekelompok orang dalam satu satuan kerja mempunyai sasaran yang jelas untuk di capai. Motivasi kerjanya pun pada umumnya lebih tinggi. Ringkasnya motivasi kerja melatarbelakangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, khususnya dalam membuat perencanaan yang benar-benar dibutuhkan.

Aparat BAPPEDA, utamanya pimpinan merupakan pihak yang dituntut untuk memberikan motivasi bawahannya agar menggunakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilannya, serta mau bekerja giat untuk mencapai hasil kerja yang optimal . Selain itu, pimpinan juga merupakan pihak yang dapat menumbuhkan iklim kerja yang sehat dimana hak dan kewajiban pegawai diatur sedemikian rupa selaras dengan fungsi , peranan dan tanggung jawab dari karyawan sehinggadapat mendorong motivasi kerja kearah partisipasi pegawai pada organisasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar. Dasar penelitian ini adalah survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden yang dianggap dapat mewakili individu lainnya secara keseluruhan.

Sumber Data

Dari penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan dari dua sumber yaitu Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan berdasarkan

pedoman yang telah dibuat serta pengamatan secara langsung terhadap responden. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat didukung kelengkapan data primer. Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersama-sama dimaksudkan agar saling melengkapi yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, selain itu hal ini dilakukan sekaligus untuk perbandingan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Aparat BAPPEDA

1. Kualitas Produk Perencanaan

Kualitas produk perencanaan dalam penelitian ini, dilihat dari pelayakan penguangan usul rencana dalam anggaran daerah berdasarkan standar yang ditetapkan berdasarkan ketetapan dan kesepakatan bersama, dan digunakan untuk mengetahui kewajaran dan kemanfaatannya bagi pelaku, masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Kualitas produk perencanaan merupakan salah satu indikator yang penulis lakukan untuk menilai kinerja aparat Bappeda dalam perencanaan pembangunan di kota Makassar. Untuk melihat indikator ini penulis melihat pada sisi pemahaman aparat terhadap strategi pembangunan serta pengetahuan tentang visi dan misi, cara, proses maupun hasil kerja dalam setiap tahapan pelaksanaan perumusan maupun pembuatan RPJMD.

Tabel 1
Pemahaman Aparat BAPPEDA Terhadap Strategi Pembangunan Dalam Penyusunan RPJMD

No	Kriteria Penilaian	f	%
1.	<i>Sangat paham</i>	5	33.00
2.	<i>Paham</i>	10	67.00
3.	<i>Kurang paham</i>	-	0.00
4.	<i>Tidak paham</i>	-	0.00
J U M L A H Rata-Rata Skor		15	100.00

Sumber: Data Primer, 2022.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh data bahwa dari 15 reponden yang kesemuanya berasal dari aparat Bappeda menyatakan paham terhadap strategi pembangunan dalam penyusunan RPJMD. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dimana 5 orang sangat paham (33%) serta 10 orang paham (66,5%).

Selanjutnya dari semua responden yang paham terhadap strategi pembangunan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar, di peroleh data yang berisi penjelasan tentang alasan responden menilai aparat Bappeda telah mampu memahami strategi pembangunan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

Tabel 2
Alasan Responden Bahwa Aparat Telah Mampu Memahami Strategi Pembangunan Dalam Penyusunan RPJMD

No	Alasan Responden	f	%
1.	<i>Termuat dalam dokumen RPJMD Kota Makassar</i>	8	53 %
2.	<i>Mampu menghasilkan program/ kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat</i>	2	13 %
3.	<i>Berdasarkan aspirasi/ usulan dari masyarakat tingkat bawah</i>	5	33 %
J U M L A H Rata-Rata Skor		15	100%

Sumber: Data Primer, 2022.

Dari tabel tersebut yang berisi penjelasan tentang alasan responden menilai aparat Bappeda telah mampu memahami strategi pembangunan dalam penyusunan RPJMD. Diperoleh hasil bahwa 8 orang (53 %) memberikan alasan karena termuat dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, 2 orang (13 %) memberikan alasan karena mampu menghasilkan program/ kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat, 5 orang (33%) memberikan alasan karena Berdasarkan aspirasi/ usulan dari masyarakat tingkat bawah.

2. Responsifitas

Aparat harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, saran yang disampaikan oleh berbagai kelompok, tuntutan yang diajukan bahkan kritik membangun yang disarankan harus dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pembangunan daerah. Tidak tanggap dapat beakibat tidak tertampungnya kebutuhan dan keinginan di daerah yang sama artinya kehilangan kesempatan untuk memperoleh masukan penting.

Tabel 3
Penilaian tentang kesigapan/ Respon Bappeda terhadap usulan maupun kritikan Masyarakat

No	Stakeholders	Penilaian Tentang Kesigapan/ Respon Bappeda Terhadap Usulan Maupun Kritikan Masyarakat				Total
		Sangat Mampu	Mampu	Kurang Mampu	Tidak Mampu	
1	<i>Aparat Bappeda</i>	2	12	1	-	15
		100.00	40.00	9.09	0.00	
2	<i>Anggota DPRD</i>	-	6	1	-	7
		0.00	20.00	9.09	0.00	
3	<i>Dinas/ Instansi</i>	-	6	3	1	10
		0.00	20.00	27.27	50.00	
4	<i>Kecamatan</i>	-	3	2	-	5
		0.00	10.00	18.18	0.00	

5	Lurah/Tokoh Masyarakat	-	3	4	1	8
		0.00	10.00	36.36	50.00	
Total		2	30	11	2	45
%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		4.44	66.66	24.44	4.44	100.00

Sumber: Data Primer, 2022.

Tabel ini merupakan tanggapan serta penilaian responden tentang krsigapan/respon Bappeda terhadap usulan masyarakat maupun kritikan masyarakat. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai aparat Bappeda telah mampu menerima berbagai usulan maupun kritikan dari masyarakat dalam usaha perencanaan pembangunan daerah. Dari keseluruhan responden sebanyak 30 orang (66,66%) menyatakan mampu sedangkan hanya 2 orang (4,44%) yang menyatakan tidak mampu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas.

3. Akuntabilitas

Tanggapan stakeholders tentang hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Tanggapan Stakeholders Terhadap Hasil Penyusunan RPJMD

No	Stakeholders	Tanggapan Stakeholders Terhadap Hasil Penyusunan RPJMD					Total
		Sangat mampu	mampu	Kurang mampu	Tidak mampu	Tidak tahu	
1	Aparat Bappeda	2	13	-	-	-	15
		100.00	41.93	0.00	0.00	0.00	
2	Anggota DPRD	-	5	-	-	2	7
		0.00	16.12	0.00	0.00	22.22	
3	Dinas/ Instansi	-	7	2	-	1	10
		0.00	22.58	66.66	0.00	11.11	
4	Kecamatan	-	3	1	-	1	5
		0.00	9.67	33.34	0.00	11.11	
5	Lurah/Tokoh Masyarakat	-	3	-	-	5	8
		0.00	9.67	0.00	0.00	55.55	
Total		2	31	3	0	9	45
		100.00	100.00	100.00	00.00	100.00	100.00
		4.44	68.88	6.66	00.00	20.00	

Sumber: Data Primer, 2022

Dari data yang diperoleh terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa Aparat BAPPEDA telah mampu melaksanakan tugasnya dalam penyusunan RJMD. Hal ini

dibuktikan dengan besarnya persentase yang diberikan responden yakni sebanyak 31 orang (68,88%) diantaranya berasal dari aparat Bappeda sebanyak 13 orang (41,93%), anggota DPRD sebanyak 5 orang (16,12%), Dinas/Instansi Terkait sebanyak 7 orang (22,58%) serta pihak kecamatan dan Lurah masing-masing sebanyak 3 orang (9,67%) sedangkan responden yang tidak memberikan tanggapan sebanyak 9 orang (20%) yang berasal dari 2 orang anggota DPRD (22,22%) 5 orang Lurah (55,55%) serta dari dinas/instansi terkait dan pihak kecamatan masing-masing sebanyak 1 orang (11,11%).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kota Makassar dalam menyusun perencanaan pembangunan pada dasarnya aparat BAPPEDA dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada dokumen perencanaan. Penilaian aparat BAPPEDA terhadap kinerjanya sangat bersifat subjektif. Walaupun demikian ternyata ada responden yang menilai kinerja aparat BAPPEDA kurang baik. Namun dapat disimpulkan bahwasanya aparat BAPPEDA telah mampu melaksanakan tugasnya dalam mempertimbangkan segala kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAPPEDA senantiasa melakukan koordinasi serta memberitahukan kepada seluruh stakeholders yang ada tentang hasil perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai bahan acuan kepada masyarakat maupun DPRD Kota Makassar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Oktaviani Putri, Sirojuzilam Dan Abdul Kadir. 2018. *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dikelurahan Sel Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Arifin, Z. . (2021). Penerapan E-government dalam Pengembangan Sistem Komunikasi dan Telematika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 12(2), 145–159. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.332>
- Fahrizanur. 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kota Paser*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 5 (4) :1599-1612
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Ekonomi Pembangunan II*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Masjudin Ashari, Wahyunadi, & Hailuddin. 2015. *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No.2, Desember 2015: 163-180.
- Muhammad, Khairul Anwar. 2016. *Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Kota Samarinda*. *Jurnal Administrasi Negara*, 2016, 4(1): 2305-2319.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-22002. Mataram: Bappeda Provinsi NTB.
- Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta
- Riyadi, dan Brata kusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Safi'I, H. M. 2009. *Perencanaan pembangunan daerah*. Averroes Press
- Siswanto Sunarto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setio Rini. 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Di Kecamatan Samarinda Ulu)*. Jurnal Administrasi Negara Volume 5, (Nomor 2) 2017:5948-5961.
- Sjafrisal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarwati.1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Daerah* . Jakarta: Rajawali.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metodologi Penelitian Dalam Teoridan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Tarigan, Rabinson. 2006. *Perencanaan pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta:BumiAksara.
- Todaro, Michael P. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Wrihatnolo, R. Randy. Nugroho.D.Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Zulkarimen, Nasution. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teoridan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.